

REFORMASI YANG DIPERLUKAN BANGSA INDONESIA

Sayidiman Suryohadiprojo*)

Gerakan Reformasi 1998

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami pukulan Krisis Ekonomi yang amat berat. Ketika itu negara-negara Asia Tenggara mengalami pukulan ekonomi yang berat. Mula-mula pada pertengahan 1997 yang terpukul adalah Malaysia, tidak lama kemudian diikuti oleh Thailand. Para pejabat IMF yang selalu membimbing dan mengawasi perkembangan ekonomi Indonesia mengatakan bahwa Indonesia tidak akan turut terpukul karena dasar-dasar ekonomi Indonesia sehat dan kuat. Tentu saja mereka mengatakan demikian karena perkembangan ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi kehendak IMF. Akan tetapi mereka salah sekali, sebab Indonesia pun tidak bebas dari pukulan ekonomi yang akibatnya malahan jauh lebih parah dari pada yang dialami Malaysia dan Thailand. Indonesia benar-benar berada dalam Krisis Ekonomi yang kemudian tidak dapat diatasi secara cepat.

Krisis Ekonomi itu membawa dampak politik yang sangat besar. Ternyata Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia sejak tahun 1966 dan berhasil menciptakan kondisi ekonomi yang nampaknya maju, tidak kuat dan malahan kewalahan menghadapi krisis itu. Ternyata apa yang disangka kemajuan ekonomi Indonesia sebagai hasil pembangunan nasional sejak tahun 1968, adalah satu mitos palsu dan kesejahteraan semu belaka karena terbukti penuh kelemahan dan kerawanan ser-

ta keropos dari dalam. Pukulan pada tahun 1997 memberikan bukti nyata dari keadaan itu.

Kalau kemudian IMF berpikir dapat memperbaiki keadaan, yang terjadi malahan sebaliknya. Keputusan-keputusan IMF yang didesakkan kepada pemerintah RI untuk dilaksanakan, bukannya memperbaiki keadaan, malahan membuat keadaan makin parah. Hal itu kemudian dinyatakan oleh banyak pakar ekonomi yang netral dan tidak tunduk kepada apa yang dinamakan Washington Consensus, an-

*) Letjen TNI (Purn.) Sayidiman, Mantan Gubernur Lemhannas

taranya Prof. DR. Joseph Stiglitz seorang pemenang Hadiah Nobel dalam Ekonomi dan mantan penasehat utama bidang ekonomi untuk presiden AS.¹

Presiden Soeharto yang sebelumnya selalu tegar memimpin Indonesia, sebagaimana dibuktikan ketika memimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1992-1994, amat berat menghadapi pukulan ekonomi itu. Wibawa Soeharto amat turun di dalam maupun luar negeri ketika harus mengikuti kehendak pimpinan IMF Camdessus yang menunjukkan sikap yang amat merendahkan Presiden Soeharto. Berbeda dengan Malaysia yang di bawah kepemimpinan perdana menteri Mahathir justru melepaskan diri dari hubungan IMF untuk mengatasi krisis ekonominya, Indonesia malahan makin terjatuh dalam pengaturan IMF yang tidak berorientasi pada kepentingan Indonesia, melainkan diabdikan kepentingan Washington Consensus atau Amerika Serikat.

Kemunduran dalam kepemimpinan Soeharto memberikan kesempatan baik bagi lawan-lawan politiknya yang sudah lama menantikan peluang untuk memukul Soeharto. Adalah kenyataan bahwa kepemimpinan Soeharto, terutama sejak tahun 1980-an, mengakibatkan banyak

ketidak-puasan dalam masyarakat. Tampak sekali bahwa tidak ada niat untuk mewujudkan demokrasi dalam kehidupan bangsa, meskipun Soeharto dan para pendukungnya selalu mengumandangkan ditegakkannya Demokrasi Pancasila. Sebaliknya yang terwujud adalah satu kekuasaan otoriter yang tidak memberikan kesempatan pada rakyat banyak untuk mengemukakan pendapat. Kekuasaan otoriter itu didukung oleh partai Golkar yang para pemimpinnya mempunyai kepentingan pribadi dalam kelangsungan kekuasaan Presiden Soeharto. Dukungan ini diamankan dan diperkuat oleh peran politik ABRI yang sejak tahun 1980-an sudah sepenuhnya di tangan pimpinan yang bukan berasal dari para pejuang 1945. Dengan begitu Presiden Soeharto sebagai mantan jenderal TNI-AD lebih mudah memanipulasi ABRI untuk kepentingan politiknya, khususnya untuk melanggengkan kekuasaannya. Manajemen personil ABRI lebih diorientasikan kepada pelayanan kepentingan Soeharto dan kepentingan pimpinan ABRI pribadi dari pada bersifat lugas sesuai keperluan dan kepentingan organisasi. Makin menjadi kenyataan bahwa hanya perwira yang pernah

¹ Joseph E. Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, New York, W.W. Norton & Company, 2002

menjadi ADC atau ajudan Presiden Soeharto yang ada kemungkinan menjadi pimpinan AD, AL, AU dan Kepolisian. Sebab mereka mantan ajudannya, maka Soeharto sudah dapat menilai berapa kuat mereka untuk dapat dipercaya dan mengabdikan kepentingannya.

Hal itu diperparah lagi ketika Presiden Soeharto memungkinkan putera-puterinya terjun dalam dunia bisnis dan memanfaatkan kekuasaan ayah mereka untuk memperoleh berbagai kemudahan dan keuntungan yang tidak wajar. Bersamaan dengan itu timbul kaum bisnis gadungan yang menempatkan diri di keliling Soeharto dan keluarganya untuk turut menikmati keuntungan dan kesempatan yang tidak mungkin diperoleh orang lain. Kondisi menjadi demikian parah di mata mayoritas masyarakat sehingga secara sinis orang mengatakan bahwa memang sudah terwujud dengan bagus sekali "ekonomi kekeluargaan" sebagaimana dikehendaki UUD 1945 pasal 33. Akan tetapi kekeluargaan itu adalah keluarga Soeharto beserta kawan-kawannya. Dalam kondisi itu hanya mereka yang betul-betul oleh Soeharto dan putera-puterinya dinilai sesuai dengan kepentingan keluarga mereka yang mendapat peluang dan kesempatan memperoleh kenaikan ja-

batan, rezeki bisnis dan kedudukan politik. Terwujudlah apa yang kemudian dinamakan KKN atau Korupsi-Kolusi-Nepotisme. Bersamaan dengan itu dengan sendirinya, korupsi makin meluas dan menguat sehingga menjadikan Indonesia tergolong negara terkorup di dunia.

Yang amat dirugikan oleh perkembangan ini adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Sebab jiwa perjuangan TNI yang selalu dipegang teguh sejak berdirinya pada tahun 1945, yaitu mengabdikan kepada kepentingan Negara dan Bangsa, telah direduksi menjadi pengabdian kepada seorang dengan keluarganya serta kepentingannya. Dengan begitu Dwi Fungsi TNI yang sejak 1945 cukup positif dan bermanfaat untuk menjamin terwujudnya kemerdekaan bangsa serta melindunginya terhadap berbagai ancaman, seperti terhadap pemberontakan Darul Islam, PRRI/Permesta dan dua kali pemberontakan PKI, mengalami degradasi yang amat parah. Kalau sebelumnya TNI selalu mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat karena perjuangan dan sepek terjangnya mengejawantahkan kehendak mayoritas bangsa, sejak saat itu justru makin menguat penolakan banyak kalangan masyarakat terhadap TNI dan pelaksanaan Dwifungsinya. Bah-

kan di lingkungan purnawirawan TNI yang pejuang 1945 tidak sedikit yang merasa jengkel dan marah terhadap pelaksanaan Dwi Fungsi TNI yang merusak itu, termasuk Jendral A.H. Nasution, Letnan Jendral Marinir Ali Sadikin dan banyak Perwira Senior lainnya. Kondisi itu secara langsung dan tidak langsung merugikan sikap patriotik dan nasionalisme bangsa.

Kemunduran dalam kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1997 membuka peluang bagi mereka yang sudah muak dengan keadaan di atas dan ingin mengadakan perubahan. Inilah permulaan dari Gerakan Reformasi 1998.

Tidak terlalu jelas siapa yang paling dulu menggunakan istilah Reformasi. Yang dapat dicatat adalah bahwa Dr. Amien Rais dikenal dan diakui sebagai Tokoh Reformasi Utama. Ia adalah pimpinan organisasi Islam Muhammadiyah, dosen di Universitas Gajah Mada (UGM) dan ketua dewan pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Memang Amien Rais sejak lama tidak dapat menyetujui kepemimpinan Presiden Soeharto yang berakibat begitu buruk bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi mungkin sekali sikapnya melawan Soeharto amat menguat ketika Soeharto menghendaki Amien Rais diturunkan

dari pimpinan di ICMI karena telah menulis satu artikel tentang ketidakberesan hubungan pemerintah Indonesia dengan perusahaan multinasional Freeport yang dinilainya sangat merugikan bangsa Indonesia.

Posisinya dalam masyarakat yang macam-macam memungkinkan Amien Rais untuk mempengaruhi dan menggerakkan banyak kalangan, terutama kaum muda dan mahasiswa. Mereka bergerak untuk mengadakan perubahan dalam kepemimpinan nasional Indonesia yang mereka nilai sudah amat merugikan kehidupan bangsa. Tujuan utama selain perubahan kepemimpinan adalah menghabiskan KKN di Indonesia serta kondisi yang menghasilkannya.

Tidak hanya Amien Rais yang tergerak mengadakan perubahan. Di samping gerakannya yang terutama meliputi kalangan Islam dan terutama yang dekat dengan Muhammadiyah, ada pula gerakan yang bersumber pada Nahdlatul Ulama yang dipimpin Abdurrahman Wahid. Tokoh ini pun merasa kurang mendapat perhatian dan penghargaan dalam kondisi masyarakat yang dipimpin Soeharto. Kemudian ada Megawati Soekarnoputri yang telah diperlakukan sangat tidak baik oleh Soeharto yang tidak menghendaki

Megawati memegang kepemimpinan partai Partai Demokrasi Indonesia (PDI), padahal mayoritas anggota PDI memilihnya sebagai pimpinan. Megawati dan pendukungnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menentang Soeharto. Juga ada sekelompok purnawirawan TNI yang makin tidak senang dengan kepemimpinan Soeharto dan mendukung gerakan untuk menurunkannya. Tokoh-tokoh mereka seperti Kemal Idris, Ali Sadikin, juga menghendaki perubahan segera, dan ada kalangan cendekiawan yang turut bergabung dalam gerakan perubahan itu. Mereka semua mendukung perlunya Reformasi untuk Indonesia. Sekalipun mereka masing-masing mempunyai kepentingannya sendiri, namun pada permulaan mereka satu tujuan untuk menggantikan kepemimpinan nasional.

Dalam kondisi Indonesia yang makin menurun akhirnya Presiden Soeharto makin merasa lemah dan terdesak. Pada tahun 1998 ia masih berhasil mengadakan Pemilihan Umum yang seperti biasa dimenangkan Golkar secara mencolok dan kemudian membentuk kabinet baru. Pemerintahan baru itu dilantik pada bulan Maret 1998 tentu dengan tujuan untuk mengatasi berbagai tantangan, khususnya mengatasi Krisis Ekonomi, memberikan res-

pons yang dapat menetralisasi Gerakan Reformasi, dan menjamin kelangsungan kepemimpinan kelompok Soeharto. Akan tetapi niat itu tidak kuat menahan dinamika Gerakan Reformasi sehingga pada bulan Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri sebagai Presiden RI.

Turunnya Soeharto sebagai presiden jelas merupakan kemenangan Gerakan Reformasi. Yang kemudian menjadi tantangan adalah bagaimana gerakan itu berjalan selanjutnya sehingga benar-benar membawa Indonesia kepada kondisi yang diinginkan kaum Reformasi.

Maka di situlah tantangan paling berat buat Gerakan Reformasi 1998. Sebab mulai saat itu kepentingan-kepentingan masing-masing kelompok mulai muncul dan tidak ada kepemimpinan yang cukup mampu untuk menimbulkan satu gerakan reformasi yang mendapat dukungan semua kalangan. Sehingga hampir semua kalangan Gerakan Reformasi 1998 terpaksa mengakui bahwa samapai tahun 2005 pun belum dapat dikatakan bahwa Reformasi telah mencapai sasarannya. Memang sudah ada pergantian kepemimpinan nasional sejak Mei 1998, bahkan tiga kali diganti. Mula-mula Presiden Soeharto digantikan oleh Prof.DR.Habibie

yang sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 1998 sesuai ketentuan UUD 1945 menggantikan Presiden Soeharto. Akan tetapi Pemilihan Umum yang kemudian dilakukan mengakibatkan Prof. DR. Habibie sudah harus turun pada tahun 1999 dan digantikan Abdurrahman Wahid. Presiden ini pun hanya memegang pimpinan nasional sampai tahun 2001 dan digantikan Megawati Soekarnoputri. Inipun hanya bertahan sampai tahun 2004 ketika dalam Pemilihan Presiden secara langsung Susilo Bambang Yudhoyono terpilih oleh rakyat sebagai Presiden RI.

Perubahan kepemimpinan nasional ternyata tidak membawa kondisi yang diharapkan kaum Reformasi. Selain tidak dirasakan ada kemajuan besar dalam pemberantasan KKN, juga ekonomi tidak kunjung membaik. Selain itu politik dinilai kurang sesuai dengan apa yang diinginkan. Memang sejak tahun 1998 sudah ada kebebasan yang jauh lebih luas dari sebelumnya, tetapi kemudian justru menjadi kebebasan yang berlebih-lebihan dan kebablasan sehingga malah merugikan masyarakat. Selain itu kaum Reformasi tidak dapat mencegah masuknya pengaruh luar negeri yang hendak memanfaatkan terjadinya per-

ubahan di Indonesia untuk menguatkan dan mencapai kepentingannya sendiri.

Dalam hal ini terutama dicapai keuntungan banyak oleh gerakan liberalisme, kapitalisme dan individualisme dengan AS sebagai kubu utamanya. Itu masuk akal, karena AS sejak kemenangannya dalam Perang Dingin pada tahun 1990 bertekad untuk menyebarkan pandangannya di seluruh dunia dan dianut seluruh umat manusia. Politik luar negerinya memperjuangkan agar semua bangsa mau mengikuti kehendaknya, terutama dalam menegakkan demokrasi, hak azasi manusia dan perdagangan bebas, semua menurut versi AS.² Apalagi di AS berkembang pihak gerakan neo-konservatif yang memperjuangkan hegemoni AS di seluruh dunia dan juga gerakan neo-liberalisme yang menginginkan pandangannya dianut semua bangsa. Ini semua juga hendak mereka bawa ke Indonesia.

Hal ini jelas nampak dalam perkembangan Gerakan Reformasi 1998. Melalui orang-orang Indonesia yang setuju dengan kehendak Amerika dan yang mempunyai sifat oportunis, Gerakan Reformasi diusahakan berjalan sesuai dengan kehendak itu. Bahkan secara terang-terang-

² David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, 2005

an orang Amerika sendiri tinggal di Indonesia untuk membantu orang-orang Indonesia yang mereka kendalikan. Yang amat penting adalah dukungan keuangan AS yang sukar diimbangi oleh pihak lain, sedangkan faktor uang menjadi makin berpengaruh di Indonesia. Dengan perkembangan ini serta kurang serasinya para pemimpin Gerakan Reformasi sendiri, maka Reformasi 1998 tidak dapat diharapkan memberikan perubahan dan perbaikan yang diharapkan masyarakat Indonesia.

Masyarakat dan rakyat Indonesia bukannya makin sejahtera, melainkan justru makin sukar hidupnya.

Revolusi Indonesia 1945

Untuk menentukan Reformasi yang benar-benar diperlukan, maka kita perlu melihat perkembangan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaannya pada tahun 1945. Pada waktu itu dinyatakan bahwa bangsa Indonesia melakukan Revolusi untuk menjamin pencapaian tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Rakyat Indonesia sudah terlalu lama menderita dalam penjajahan Belanda dan akhirnya Jepang, dan sudah amat haus kepada kehidupan yang lebih baik, lebih maju dan sejahtera,

seperti yang dialami banyak bangsa lain di dunia.

Sebenarnya hanya ada perbedaan gradual antara pengertian Revolusi dan Reformasi. Revolusi adalah satu gerakan perubahan yang radikal, dilakukan dalam jangka waktu pendek dan beruang lingkup luas yang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Bung Karno sebagai pimpinan Revolusi Indonesia 1945 sering mengatakan bahwa revolusi adalah pengebolan segala nilai yang sedang berlaku untuk diganti dengan nilai-nilai baru yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia, atau *die Umwertung alle Werte*. Ini berbeda sekali dengan Evolusi yang juga bersifat perubahan, tetapi yang terjadi secara alamiah dan tidak radikal dan karena itu menggunakan jangka waktu yang relatif panjang. Hal itu umpama terjadi pada perubahan makhluk Manusia sejak purbakala hingga masa kini. Memang terjadi perubahan yang penting, tetapi karena terjadi dalam jangka panjang maka sifatnya tidak radikal. Sedangkan Reformasi adalah perubahan yang lebih cepat dari Evolusi tetapi tidak seradikal Revolusi. Akan tetapi perubahan yang dilakukan pun sangat penting dan berakibat luas dalam masyarakat. Di lingkungan pimpinan gerakan komunis sebelum 1990,

baik di Uni Soviet maupun RRC, ada kebiasaan untuk menuduh saingannya dalam gerakan komunis sebagai Reformis atau Revisionis. Itu berarti bahwa saingan itu bukan pendukung revolusi, padahal gerakan komunis menghendaki Revolusi Proletariat. Itu berarti bahwa dengan menuduh saingan sebagai Reformis hendak dikatakan bahwa saingan itu tidak patut memimpin gerakan komunis sedunia. Itu dapat dilihat ketika pemimpin partai komunis China Mao Zedong menamakan para pemimpin Uni Soviet, seperti Krushev, sebagai Reformis dan karena itu tidak patut memimpin perjuangan komunis sedunia. Namun buat orang umum, termasuk kita, kata Reformasi tidak perlu memberi konotasi negatif atau rendah.

Jadi Reformasi dapat dikatakan sebagai Evolusi yang dipercepat, tetapi bukan Revolusi yang sifatnya radikal.

Pada tahun 1945 bangsa Indonesia melakukan Revolusi yang memang pada waktu itu diperlukan. Sebab waktu itu harus diadakan perubahan dari masyarakat kolonial ke masyarakat merdeka, sedangkan pihak kolonialnya yaitu Belanda sama sekali tidak bersedia memberikan kesempatan untuk perubahan ke masyarakat merdeka. Itu berbeda dengan sikap Inggris sebagai

penjajah yang setelah tahun 1945 akhirnya sadar bahwa untuk kepentingannya dalam jangka panjang lebih baik ia berikan kesempatan kepada daerah jajahannya untuk menjadi negara merdeka. Mungkin Belanda beranggapan bahwa sebagai negara kecil ia akan kehilangan segalanya kalau Indonesia disetujui menjadi merdeka, sebagaimana ada pepatah *Indie Verloren, Ramspoed Geboren*, atau kalau kehilangan Indonesia akan terjadi penderitaan besar bagi Belanda.

Sebab itu sikap kaum pejuang kemerdekaan Indonesia tidak dapat disamakan dengan para pejuang India di bawah pimpinan Pandit Jawaharlal Nehru. Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pimpinan perjuangan kemerdekaan sepakat bahwa harus ada gerakan revolusioner untuk merebut dan menegakkan Indonesia Merdeka.

Itu berarti segala ketentuan dan bahkan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang dijajah Belanda harus dijebol untuk digantikan dengan ketentuan dan hukum yang cocok dengan kepentingan Indonesia Merdeka. Pada permulaan kemerdekaan para pemimpin bangsa yang mewakili seluruh rakyat setuju bahwa Pancasila menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Juni

1945 Bung Karno di depan para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia yang merdeka memerlukan satu pandangan hidup, satu *Weltanschauung*. Kemudian beliau mengemukakan pikiran beliau yang beliau namakan Pancasila dan diusulkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Usul itu diterima dan kemudian Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Dengan begitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus mengganti ketentuan dan nilai-nilai masyarakat penjajahan. Atas dasar itu maka kemudian disusun Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila untuk diwujudkan.

Revolusi Indonesia berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Sekalipun mula-mula Indonesia harus menerima kompromi yang tercapai dalam Konferensi Meja Bundar dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, namun kemudian dengan cepat dalam waktu kurang dari setahun Republik Indonesia Serikat dapat dihapuskan dan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sudah memperoleh eksistensi. Seharusnya kemudian dengan menggunakan Republik Indonesia sebagai wahana utama, Revolusi Indonesia harus diselesai-

kan dengan terwujudnya masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila. Baru kalau itu tercapai dapat dikatakan bahwa Revolusi Indonesia mencapai tujuannya.

Jadi sebenarnya Bung Karno sebagai pimpinan Revolusi, apalagi ia dinamakan atau menamakan diri Pemimpin Besar Revolusi (PBR), harus memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan tegaknya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dan bumi Indonesia. Hal itu sebenarnya masuk akal dan memudahkan perjuangan, karena Bung Karnolah yang melahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945.

Akan tetapi adalah aneh sekali dan celaka bagi bangsa Indonesia, bahwa Pencetus Pancasila tidak berusaha dengan cukup sungguh-sungguh untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Pada permulaan setelah 1950 masih cukup sering Bung Karno mengucapkan pentingnya Pancasila. Akan tetapi kepemimpinannya atas Republik Indonesia dan tindakannya makin tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketika mengeluarkan Dekrit Presiden pada tahun 1954 untuk kembali kepada UUD 1945 Bung Karno masih di jalan yang sesuai, karena dengan begitu Pancasila akan lebih tegas menjadi pedoman perjuangan bangsa.

Akan tetapi ketika Bung Karno menetapkan Demokrasi Terpimpin sebagai jalan untuk memimpin kelanjutan Revolusi, maka mulai terjadi penyelewengan. Sebab Demokrasi Terpimpin sama sekali tidak mengandung kenyataan demokrasi, atau kemungkinan bagi rakyat untuk menentukan dan menyatakan kehendaknya. Malahan yang terjadi adalah kekuasaan otoriter yang lebih dekat ke diktatur. Lebih parah lagi ketika kesejahteraan rakyat Indonesia diterlantarkan sehingga rakyat makin miskin. Sedangkan secara politik Bung Karno makin memungkinkan Partai Komunis Indonesia (PKI) memegang pemerintahan. Padahal PKI telah mengkhianati perjuangan RI ketika melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan menusuk dari belakang bangsa Indonesia yang sedang berjuang menghadapi penjajah Belanda. Lebih aneh lagi, dalam pemberontakan PKI itu kaum komunis tidak mau lagi kepemimpinan Bung Karno berlangsung di Indonesia. Tetapi mulai tahun 1960-an Presiden Sukarno makin memberikan peluang bagi PKI untuk menguasai Indonesia. Dengan dilandasi slogan "Revolusi Belum Selesai", Bung Karno mengorbankan kepentingan rakyat yang ingin hidup sejahtera. Sebaliknya Bung Karno sama sekali tidak

berusaha untuk memenangkan Revolusi Indonesia, yaitu terwujudnya dan tegaknya nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan bumi Indonesia. Penyelewengan Revolusi Indonesia berakhir dengan terjadi pemberontakan G30S/PKI yang merupakan usaha PKI kedua kali untuk merebut kekuasaan di Indonesia dan sekurang-kurangnya secara tidak langsung mendapat dukungan Bung Karno. Maka dengan sangat tragis bagi bangsa Indonesia, Revolusi Indonesia yang seharusnya membawa bangsa Indonesia kepada masyarakat yang adil-makmur berdasarkan Pancasila, malahan hasilnya adalah kesejahteraan rakyat yang makin parah dan jauhnya keadilan bagi rakyat umumnya.

Gerakan Orde Baru

Kegagalan kepemimpinan Presiden Sukarno yang berakibat terjadinya pemberontakan G30S/PKI, membawa munculnya jenderal Soeharto sebagai pimpinan nasional Indonesia. Mula-mula Presiden Soeharto nampak serius dalam mengantar bangsa Indonesia kepada pencapaian aspirasinya. Ditetapkan adanya Orde Baru yang bertujuan menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Jadi itu berarti akan ada usaha untuk menyelesaikan Revolusi

Indonesia sebagaimana mestinya. Akan tetapi karena Bung Karno semasa kepemimpinannya telah menggunakan pengertian Revolusi secara berlebihan dan bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kata Revolusi sudah kurang disukai banyak orang dan tidak digunakan lagi untuk mencegah salah pengertian.

Pada permulaan semua berjalan baik dan rakyat pada umumnya mempunyai harapan besar untuk masa depannya. Pada tahun 1968 dicanangkan permulaan dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk melahirkan aspirasi bangsa dalam bentuk kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Kehidupan ekonomi rakyat benar-benar memperoleh perhatian ketika pertanian diperbaiki dan sandang-pangan rakyat ditingkatkan baik jumlah maupun mutunya. Di bidang politik juga dilakukan penyempurnaan. Pers memperoleh kebebasan lebih banyak dari di masa Bung Karno. Lembaga-lembaga politik disempurnakan dan diadakan pemilihan umum setiap lima tahun. Diadakan usaha memperbaiki birokrasi dengan mengaktifkan fungsi menteri perbaikan aparatur negara. Pendeknya, dari tahun 1966 hingga tahun 1980-an masih terasa bahwa kepemimpinan Presiden Soehar-

to mengantarkan bangsa ke arah yang benar.

Akan tetapi kemudian terjadi perubahan dalam kepemimpinan itu yang mengakibatkan Orde Baru makin menyeleweng dari tujuannya. Presiden Soeharto mulai mempunyai ambisi untuk menjadi Presiden Seumur Hidup seperti Bung Karno. Untuk itu partai Golkar dijadikan wahana yang tidak memungkinkan partai lain menang dalam Pemilu. Selain itu dalam Golkar sendiri tidak diadakan pembentukan kader yang memungkinkan ada pergantian kepemimpinan secara baik dan teratur. Yang memegang jabatan kepemimpinan Golkar hanya mereka yang sesuai dengan kepentingan Presiden Soeharto. Untuk itu ia mengawasi dengan saksama setiap pergantian personil, baik di Pusat maupun di Daerah. Juga terhadap ABRI dilakukan manajemen yang makin berorientasi pada kekuasaan, terutama melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto. Hal ini terutama dilakukan dalam pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI. ABRI tidak dikembangkan menjadi organisasi professional yang tangguh, tetapi lebih diarahkan sebagai kekuatan politik yang bermanfaat bagi kekuasaan. Dalihnya adalah bahwa negara tidak cukup dana untuk membangun ABRI dengan sistem senjata yang

modern.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hal yang paling merusak Orde Baru adalah peran putera-puteri Soeharto yang menyalahgunakan kedudukan ayah mereka untuk melakukan bisnis. Andai kata mereka menjalankan bisnis secara baik dan professional tidak akan banyak yang keberatan atau mengecam. Akan tetapi sama sekali tidak dikembangkan kemampuan bisnis yang berdaya saing dilandasi kemampuan perusahaan yang tinggi. Dan bisnis semata-mata dilakukan berdasarkan kekuasaan yang memberi kesempatan sesuai kepentingannya. Kemudian putera-puteri Presiden Soeharto membuka peluang bagi petualang-petualang untuk memperoleh bagian keuntungan, asalkan mereka mau juga memberikan bagian yang menonjol kepada pemberi kesempatan. Terjadilah Korupsi-Kolusi-Nepotisme pada skala yang luas dan amat merugikan bangsa.

Maka Orde Baru benar-benar menyeleweng dari tujuan yang telah ditetapkannya sendiri, yaitu menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Itulah sumber kejatuhan Orde Baru dan Presiden Soeharto, sebagaimana Demokrasi Terpimpin menjadi sumber kejatuhan Presiden Sukarno.

Akan tetapi dengan begitu bangsa Indonesia tidak kunjung mencapai tujuan Revolusi Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Reformasi yang diperlukan bangsa Indonesia

Dari uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia memang memerlukan perubahan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Perubahan itu cukup besar dan banyak serta perlu dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama, baik dilihat dari sudut keperluan rakyat yang masih banyak diliputi kemiskinan dan keterbelakangan maupun dari sudut perkembangan internasional. Sebab itu perubahan itu tidak cukup diperoleh dengan cara Evolusi. Akan tetapi juga kurang bijaksana untuk menggunakan pengertian Revolusi karena besar kemungkinan akan timbul eksese kalau memperhatikan cara berpikir dan sikap para pemimpin Indonesia pada umumnya. Sebab itu adalah tepat untuk menggunakan pengertian Reformasi.

Reformasi yang perlu diadakan adalah pelaksanaan perubahan yang kesemuanya dapat menegakkan Pancasila di masyarakat dan bumi Indonesia. Reformasi harus mewujudkan kese-

jahteraan dan keadilan bagi rakyat Indoensia. Itu berarti bahwa Reformasi tidak boleh dibajak atau ditunggangi orang-orang yang berpandangan lain dari nilai-nilai Pancasila. Memang Pancasila adalah satu paham atau ideologi terbuka, artinya bersedia memperhatikan paham-paham lain untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Akan tetapi kalau paham lain itu mengarah pada perubahan nilai-nilai Pancasila dan hendak mengubur Pancasila, maka itu tidak dapat diberi toleransi. Apalagi kalau tidak mendatangkan kesejahteraan rakyat.

Memperhatikan pengalaman masa lampau, maka yang selalu menjadi sumber penyelewengan adalah kepemimpinan yang mula-mula bersikap benar tetapi kemudian melakukan perubahan yang menyeleweng setelah ia merasa cukup mantap kepemimpinannya. Hal itu dapat dilihat pada Bung Karno maupun Pak Harto yang mula-mula sangat menimbulkan harapan besar pada mayoritas rakyat, tetapi kemudian menimbulkan penyelewengan yang amat merugikan kehidupan bangsa.

Sebab itu perlu sekali diperhatikan agar ada kepemimpinan yang bermutu tetapi disertai pengawasan yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan yang membahayakan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat merupakan perubahan yang baik dari Gerakan Reformasi 1998. Memang ada sementara orang yang menganggap perubahan itu bertentangan dengan Panca Sila dan UUD 1945 yang asli. Dalam UUD 1945 yang asli Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan ada pula diangkat oleh pemerintah.

Perubahan ini adalah contoh dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Akan tetapi tidak tegas bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adalah kenyataan bahwa kemungkinan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung lebih memuaskan aspirasi politik rakyat, ketimbang rakyat mempercayakan pemilihan itu kepada wakil-wakilnya yang duduk di MPR. Bagaimana pun, anggota MPR akan melakukan pilihan itu lebih banyak dilandasi kepentingan pribadinya dan kehendak partai politiknya dari pada kepentingan rakyat umumnya. Sebab itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung adalah lebih sesuai dengan kepentingan rakyat dari pada pemilihan dilakukan oleh MPR. Dengan be-

gitu Presiden dan Wakil Presiden juga mempunyai legitimasi lebih kuat dalam memimpin bangsa.

Dengan legitimasi yang lebih kuat itu semoga Presiden menjalankan kepemimpinan nasional lebih sungguh-sungguh sehingga dalam waktu minimal dapat merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dan di bumi Indonesia. Akan tetapi juga perlu ada pengawasan yang saksama terhadap kepemimpinan nasional, terutama setelah mereka mantap dalam kepemimpinannya, agar tidak terulang lagi apa yang dilakukan Presiden RI pertama dan kedua.

Karena yang harus dicapai adalah tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka kepemimpinan harus menjadikan nilai-nilai Pancasila kenyataan yang hidup (*iving realities*), sehingga Pancasila berhenti hanya sebagai semboyan yang kosong atau slogan belaka.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus terwujud dalam sikap hidup dan perilaku Manusia Indonesia yang bermoral, adanya saling menghargai antara pemeluk agama dari berbagai agama yang ada di Indonesia dan penghargaan kepada setiap cara orang meluhurkan Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai Kemanusiaan yang Adil

dan Beradab terwujud dalam kehidupan yang makin menjauhi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan bagi semua warga bangsa. Selain itu adanya kekuasaan Hukum yang dirasakan adil oleh seluruh warga masyarakat. Hak Azasi Manusia dijunjung tinggi, tetapi kebebasan Individu tidak lebih tinggi nilainya dan tidak boleh mengorbankan tertib dan damainya masyarakat.

Nilai Persatuan Indonesia menghargai eksistensi setiap bagian dari negara dan bangsa Indonesia dengan antara lain memberikan otonomi kepada setiap daerah. Akan tetapi setiap daerah juga harus mengakui dan menghargai pentingnya Indonesia sebagai negara-bangsa karena itu merupakan kepentingan besar yang tak dapat diingkari mengingat perkembangan umat manusia dewasa ini dan di masa mendatang. Hasil budi daya setiap unsur bangsa adalah juga hasil budi daya nasional. Di samping itu ada pengembangan budi daya bangsa sebagai ketuhanan yang bermakna bagi kepentingan setiap bagian.

Nilai Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan harus terwujud dalam berfungsinya semua lembaga perwakilan rakyat dari tingkat paling bawah sampai tingkat

nasional serta diselenggarakannya pemilihan umum secara teratur. Juga perlu usaha agar pengambilan keputusan berdasarkan jumlah suara yang mewakili rakyat tidak mengabaikan kearifan dalam keputusan itu. Sebab itu *voting* dan musyawarah untuk mufakat sama-sama pentingnya.

Nilai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia menjadi kenyataan kalau makin banyak rakyat Indonesia hidup sejahtera dan makin besar jumlah warga negara yang termasuk Golongan Menengah, sebaliknya makin kecil jumlah Golongan Miskin. Selain itu ada kesempatan yang luas bagi setiap warga Negara dari semua bagian bangsa, dari semua agama, suku, etnik maupun tingkat kekayaan, untuk memperoleh informasi secara luas dan mengusahakan kepentingannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tertib damainya masyarakat.

Kalau hal ini semua dapat terwujud, bangsa Indonesia baru mencapai langkah pertama dalam perwujudan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal itu harus dilanjutkan dengan membuat bangsa Indonesia dan Panca Sila diakui sebagai bagian umat manusia yang tinggi nilainya dan senantiasa memperjuangkan kehidupan umat manusia yang

maju dan sejahtera, tertib dan damai.

Yang juga perlu diperhatikan adalah dipertahankannya Republik Indonesia sebagai negara kesatuan (*unitary state*) dan tidak menjadi negara federal. Ada orang-orang Indonesia, bahkan pakar Hukum Tata Negara, yang mendukung dan memperjuangkan Republik Indonesia menjadi negara federal. Umumnya mereka tidak termasuk orang yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 atau mereka kurang memahami perjuangan kemerdekaan itu. Mereka tidak menyadari bahwa konsep negara federal sudah *didiskreditkan* oleh penjajah Belanda ketika menggunakan konsep negara federal untuk menjatuhkan Republik Indonesia. Belanda dengan amat giat membentuk banyak negara seperti Negara Pasundan di Jawa Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Jawa Timur, dan lainnya. Dengan begitu Republik Indonesia hendak dibendung pengaruhnya karena sendirian berhadapan dengan sekian banyak negara buatan Belanda. Belanda hendak mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di pemerintahan negara buaatannya itu, padahal mayoritas rakyat daerah tidak setuju dengan pendirian negara di daerahnya. Malahan di Kon-

ferensi Meja Bundar pada tahun 1949 Belanda masih berhasil memaksa Republik Indonesia untuk menerima adanya Republik Indonesia Serikat (satu negara federal) yang meliputi negara-negara buatannya sebagai negara bagian dan Republik Indonesia diturunkan statusnya pula menjadi negara bagian setingkat negara buatan Belanda. Akan tetapi sudah pada tahun 1950 rakyat semua daerah memaksa parlemen di daerahnya untuk menggabungkan negara bagian kepada RI. Belanda tidak dapat mencegah hal itu karena merupakan hak rakyat berdasarkan demokrasi yang diperjuangkan Belanda sendiri. Dengan begitu kembali Republik Indonesia menjadi satu-satunya negara bangsa Indonesia sebagai satu negara kesatuan. Buat orang Indonesia yang konsisten dengan perjuangan kemerdekaan, negara kesatuan tidak boleh berubah. Apalagi sekarang tampak lagi bahwa pihak-pihak yang hendak menguasai Indonesia kembali berusaha membawa konsep negara federal dan mempengaruhi orang Indonesia seakan-akan negara federal lebih menjamin masa depan bangsa Indonesia.

Pilihan negara kesatuan sebagai bentuk negara oleh Penderita Republik Indonesia pada tahun 1945 dilakukan melalui

pendalaman yang amat matang, bukan karena emosi belaka. Salah satu alasan mengapa dipilih bentuk negara kesatuan adalah untuk menjamin agar banyaknya perbedaan antar-etnik dan antar-suku dapat diatasi. Memang setiap daerah harus memperoleh otonomi yang memungkinkan pengurusan daerah dan masyarakat yang sesuai dengan kepentingan rakyat daerah masing-masing. Selain itu, negara kesatuan menjamin manajemen nasional yang lebih ekonomis, sebab tidak perlu dibangun prasarana yang diperlukan satu negara bagian. Khususnya ketika para pakar yang masih relatif terbatas jumlahnya, hal ini sangat penting. Sebab pakar yang ada dapat dimanfaatkan untuk bangsa secara keseluruhan dan tidak hanya untuk daerahnya saja kalau daerah itu menjadi negara bagian satu negara federal.

Otonomi daerah di dalam negara kesatuan memberikan peluang untuk mengurus kepentingan rakyat daerah yang tidak perlu kalah dari yang dilakukan satu negara bagian dalam negara federal. Contoh yang baik adalah perbandingan wewenang provinsi di Perancis sebagai negara kesatuan dengan wewenang negara bagian di bekas Uni Soviet; wewenang provinsi di Perancis jauh lebih menguntungkan-

kan rakyat provinsi itu dari pada yang terjadi di negara bagian Uni Soviet.

Yang harus dijaga adalah jangan sampai negara kesatuan mengakibatkan pemusatan segala kekuasaan (*centralisme*) di pemerintah Pusat. Hal ini sangat merugikan hubungan Pusat dan Daerah dan kepentingan rakyat daerah cenderung diterlantarkan. Hal semacam itu telah terjadi di Indonesia, baik dalam pemerintahan Presiden Sukarno maupun Presiden Soeharto. Terutama rakyat di daerah yang mempunyai sumber kekayaan alam yang banyak dan berharga, cenderung merasa bahwa pemerintah pusat lebih banyak menggunakan hasil dari sumber kekayaan alam daerah untuk kepentingan Pusat dan rakyat daerah kurang memperoleh kesempatan memadai untuk menikmati hasil sumber kekayaan alamnya. Kondisi seperti itu justru membahayakan masa depan negara kesatuan karena dapat memicu terjadinya kehendak rakyat daerah untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu terjadinya gerakan separatisme. Kalau itu sampai terjadi, maka Reformasi yang harus mewujudkan Pancasila dan kesejahteraan rakyat, mengarah ke kegagalan.

Demikianlah Reformasi yang diperlukan bangsa Indonesia,

yaitu Reformasi yang mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menegakkan Pancasila di bumi Indonesia. Reformasi demikian sesuai dengan jati diri bangsa, menjawab kepentingan bangsa untuk hidup adil, sejahtera dan maju, serta memberikan kepada bangsa Indonesia kemungkinan untuk berperan secara aktif dan positif dalam arena internasional serta memberikan sumbangan berharga kepada perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.

Yang amat penting dan menentukan jalannya serta berhasilnya Reformasi adalah menemukan orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang sesuai. Orang itu harus mempunyai pandangan yang sesuai dengan Tujuan Reformasi dan mampu melaksanakannya, yaitu menjadikan Pancasila kenyataan di bumi Indonesia dan mendatangkan kesejahteraan serta kemajuan bagi rakyat seluruhnya. Pemimpin itu seorang yang kuat untuk mengajak dan mempersatukan bangsa Indonesia mencapai tujuan itu dan mengatasi segala hal yang merintanginya. Untuk memperkuat kepemimpinannya ia harus memimpin satu organisasi politik yang meluas di seluruh Indonesia dan dapat merebut dukungan dan kepercayaan mayoritas rakyat. Dalam hu-

bungannya dengan dunia luar pimpinan Reformasi itu harus dapat menunjukkan kelincahan dan kecakapan untuk memperoleh dukungan dari banyak negara dan dapat menetralisasi usaha negara-negara yang kurang cocok dengan tujuan Reformasi.

Secara pribadi pemimpin itu harus orang yang energik dan kuat semangatnya dalam melaksanakan komitmennya. Ia seorang yang tinggi kecerdasannya dan cukup bermutu intelektualitasnya. Kehidupannya bermoral sehingga cara hidup dan perilakunya menjadi tauladan dan merangsang orang lain untuk mengikuti. Ia mempunyai keseimbangan emosional yang baik

dan bukan orang yang impulsif. Keluarganya turut memberikan dukungan kepadanya dalam pelaksanaan kepemimpinannya dan tidak sebaliknya menimbulkan hambatan atau rintangan terhadap pelaksanaan kepemimpinannya. Berdasarkan hal itu semua maka ia seorang pemimpin yang dapat mengambil keputusan secara arif bijaksana pada waktu yang diperlukan.

Faktor kepemimpinan ini amat menentukan keberhasilan Reformasi. Tanpa itu akan terjadi kekacauan dan kondisi masyarakat yang penuh pertentangan yang berakibat pada stagnasi dan bahkan kegagalan Reformasi serta runtuhnya Republik Indonesia.

kan rakyat provinsi itu dari pada yang terjadi di negara bagian Uni Soviet.

Yang harus dijaga adalah jangan sampai negara kesatuan mengakibatkan pemusatan segala kekuasaan (*centralisme*) di pemerintah Pusat. Hal ini sangat merugikan hubungan Pusat dan Daerah dan kepentingan rakyat daerah cenderung diterlantarkan. Hal semacam itu telah terjadi di Indonesia, baik dalam pemerintahan Presiden Sukarno maupun Presiden Soeharto. Terutama rakyat di daerah yang mempunyai sumber kekayaan alam yang banyak dan berharga, cenderung merasa bahwa pemerintah pusat lebih banyak menggunakan hasil dari sumber kekayaan alam daerah untuk kepentingan Pusat dan rakyat daerah kurang memperoleh kesempatan memadai untuk menikmati hasil sumber kekayaan alamnya. Kondisi seperti itu justru membahayakan masa depan negara kesatuan karena dapat memicu terjadinya kehendak rakyat daerah untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu terjadinya gerakan separatisme. Kalau itu sampai terjadi, maka Reformasi yang harus mewujudkan Pancasila dan kesejahteraan rakyat, mengarah ke kegagalan.

Demikianlah Reformasi yang diperlukan bangsa Indonesia,

yaitu Reformasi yang mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menegakkan Pancasila di bumi Indonesia. Reformasi demikian sesuai dengan jati diri bangsa, menjawab kepentingan bangsa untuk hidup adil, sejahtera dan maju, serta memberikan kepada bangsa Indonesia kemungkinan untuk berperan secara aktif dan positif dalam arena internasional serta memberikan sumbangan berharga kepada perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.

Yang amat penting dan menentukan jalannya serta berhasilnya Reformasi adalah menemukan orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang sesuai. Orang itu harus mempunyai pandangan yang sesuai dengan Tujuan Reformasi dan mampu melaksanakannya, yaitu menjadikan Pancasila kenyataan di bumi Indonesia dan mendatangkan kesejahteraan serta kemajuan bagi rakyat seluruhnya. Pemimpin itu seorang yang kuat untuk mengajak dan mempersatukan bangsa Indonesia mencapai tujuan itu dan mengatasi segala hal yang merintanginya. Untuk memperkuat kepemimpinannya ia harus memimpin satu organisasi politik yang meluas di seluruh Indonesia dan dapat merebut dukungan dan kepercayaan mayoritas rakyat. Dalam hu-

bungannya dengan dunia luar pimpinan Reformasi itu harus dapat menunjukkan kelincahan dan kecakapan untuk memperoleh dukungan dari banyak negara dan dapat menetralisasi usaha negara-negara yang kurang cocok dengan tujuan Reformasi.

Secara pribadi pemimpin itu harus orang yang energik dan kuat semangatnya dalam melaksanakan komitmennya. Ia seorang yang tinggi kecerdasannya dan cukup bermutu intelektualitasnya. Kehidupannya bermoral sehingga cara hidup dan perilakunya menjadi tauladan dan merangsang orang lain untuk mengikuti. Ia mempunyai keseimbangan emosional yang baik

dan bukan orang yang impulsif. Keluarganya turut memberikan dukungan kepadanya dalam pelaksanaan kepemimpinannya dan tidak sebaliknya menimbulkan hambatan atau rintangan terhadap pelaksanaan kepemimpinannya. Berdasarkan hal itu semua maka ia seorang pemimpin yang dapat mengambil keputusan secara arif bijaksana pada waktu yang diperlukan.

Faktor kepemimpinan ini amat menentukan keberhasilan Reformasi. Tanpa itu akan terjadi kekacauan dan kondisi masyarakat yang penuh pertentangan yang berakibat pada stagnasi dan bahkan kegagalan Reformasi serta runtuhnya Republik Indonesia.